

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 24 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program Studi Profesi Apoteker harus dapat belajar cepat dan tanggap selama PKPA dan perlu lebih membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan kefarmasian di Apotek, baik dari segi klinis maupun manajemen apotek, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun di dunia kerja.
3. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya berperilaku sopan dan memperlengkapi diri dengan kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu berkomunikasi dengan pasien, teman sejawat lain, maupun karyawan yang bekerja di apotek, baik yang merupakan tenaga teknis kefarmasian ataupun tidak.
4. Apotek Kimia Farma 24 hendaknya menyediakan fasilitas ruang penyerahan obat dan KIE yang lebih besar karena melihat banyaknya pasien yang datang ke apotik, sehingga dalam penyerahan obat akan lebih cepat dan pasien tidak lama menunggu

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS Drug Information, 2011, Bethesda: American Society of Health System Pharmacist, (Electronic Version).
- Anonim.(2010). Profil Lengkap Apotek Kimia Farma Persero.Tanggal akses: 20Februari 2016.
<http://www.kedaiobat.co.cc>
- British Medical Association, 2011, British National Formulary, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Depkes RI., 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No, 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 992/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Depkes RI., 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Depkes RI., 2009, Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI., 2011, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jakarta.

- Depkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Depkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta
- Depkes RI., 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Pengurus Daerah IAI – Jawa Timur, 2010. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*. Surabaya.
- Putrawidjaja, C., [2015, Okt 22], Asal Usul Apotek di Indonesia, [Online], http://www.kompasiana.com/ciput.putrawidjaja/asal-usul-apotek-di-Indonesia562840c0569373800e0dde_e5 , [2016, Feb 29]
- Seto S., Nita Y., Triana L., 2015, Manajemen Farmasi, ed 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference
36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Solomon, M.R. & Rabolt, N. (2009). Consumer Behavior in Fashion,
2nd Edition. USA: Prentice Hall